**STATUS HAK WAKAF YANG TIDAK SESUAI DENGAN UNDANG-UNDANG
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG
WAKAF DI KECAMATAN MANDAH KABUPATEN
INDRAGIRI HILIR**

Oleh: Sy.Khairol Olfa

Pembimbing I:Dr. Firdaus, SH., MH

Pembimbing II: Ulfia Hasanah, SH.,M. Kn

Alamat: Jln. Kembang Harapan Gang Seliangguri No.22F Pekanbaru

Email: Syarifah96@ymail.com- Telepon : 085271410108

ABSTRACK

Law of the Republic of Indonesia Number 41 Year 2004 on Waqf regulate and protect the perwakafan in Indonesia, but the habits of the people Subdistrict Mandah in perwakafan done orally and by letter that was made between wakif and nadzir is not done according to orders legislation on waqf requires Parties donating land to be pledged his will clearly and firmly to the front nadzir endowment Deed official Pledge so how the status of waqf land rights that done outside the provisions of regulations tersebutpun in question. As for the purpose of this thesis, namely: First, the transfer of rights to know dikecamatan mandah waqf land. Second, to find out the status of waqf rights that are not in accordance with the Waqf Act. Third, To Know solution that can be done to overcome the problems regarding the status of rights of endowments that are inconsistent with the Act of Endowment. This research is sociological research that want to see the unity between law and society with the gap between sollen and das das sein. The research was conducted in the District Mandah District Inderagiri Downstream, while the sample population is a whole party related to the issues examined in this study, the data source used, primary data, secondary data and data tertiary data collection techniques in this research is done through interviews and review of the literature.

The conclusion that can be obtained from this study is the first, implementation of transfer of rights on waqf land in District Mandah there are still people in perwakafan Habits are done with oral and certificate made between wakif and nadzir without front Deed Official Pledge. Second, the status of waqf land that is not done through the deed of pledge endowment before PPAIW have the strength of evidence is not perfect in view of the legislation perwakafan make the non-recognition of legal acts perwakafan the Third, the solution can be done that If wakif still alive then the solution is to endowment Deed of Pledge made by PPAIW, On wakif who had died solutions that can be done is to be made waqf Deed in Lieu Deed of Pledge (APAIW) and if there sangketa, nadzir can apply for the establishment of endowments to the Religious Courts.

Advice authors to the issues examined are the First, Preferably the active role which government, represented by the Office of Religious Affairs to be the initiator gives more attention in the management of waqf property. Second, to improve the future of public awareness of the need legal counseling to every citizen. Thirdly, To the community, especially dikecamatan mandah pengikraran for more attention to the importance of endowments in the presence of Waqf Deed Official Pledge.

Key Words: Status Rights Endowments - Unsuitable OF legislation

A. Latar Belakang Masalah

Tanah sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa merupakan sumber daya alam yang sangat diperlukan manusia untuk mencukupi kebutuhan, baik yang langsung untuk kehidupannya seperti bercocok tanam atau tempat tinggal.¹ Termasuk penegakan hukum dalam mengelolah tanah tersebut merupakan suatu persoalan yang dihadapi oleh setiap masyarakat. Setiap masyarakat mempunyai tujuan yang sama, agar didalam masyarakat tercapai kedamaian sebagai akibat dari penegakan hukum yang formil.² Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.³

Menurut hukum islam perwakafan merupakan salah satu objek yang sangat penting. Bagi masyarakat islam amalan wakaf sangat besar artinya karena wakaf merupakan sadaqoh jariyah, yang nilai pahala nya tidak terputus dan mengalir terus walaupun pemberi sadaqoh meninggal dunia. Selain itu wakaf mempunyai makna yang sangat besar dalam satu kehidupan masyarakat, seperti akan mendatangkan kebajikan terhadap pemberi wakaf (*wakif*) dan memberikan manfaat dan kemudahan terhadap masyarakat bahkan negara sekalipun.⁴

Wakaf selain terkait dengan aturan-aturan hukum islam, juga terkait dengan hukum agraria nasional. Hukum agraria nasional yang menganut paham bahwa bumi merupakan karunia tuhan yang maha esa yang mempunyai fungsi sosial, maka masalah tanah wakaf dan perwakafan tanah didudukannya secara khusus. Keberadaan wakaf oleh negara diakui dan dilindungi. Sebagaimana dalam Pasal 4 ayat (1) UUPA dijelaskan bahwa “ atas dasar menguasai dari negara sebagai yang dimaksud dalam Pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut dengan tanah, yang dapat diberikan kepada dan dapat dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang-orang lain serta badan hukum”.⁵

Salah satu masalah dibidang keagamaan yang menyangkut pelaksanaan tugas-tugas keagrarian adalah tentang perwakafan Tanah milik.⁶ Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik menyatakan bahwa hanya badan hukum indonesia dan orang atau orang-orang yang telah dewasa dan sehat akalnya serta yang oleh hukum tidak terhalang untuk melakukan perbuatan atas kehendak sendiri dan tanpa paksaan dari pihak lain dapat mewakafkan tanah miliknya dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf menyatakan bahwa Pihak yang mewakafkan tanahnya harus mengikrarkan kehendaknya secara jelas dan tegas kepada Nadzir dihadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf yang kemudian menuangkannya dalam bentuk Akta Ikrar Wakaf. Dengan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2

¹Agnes Aprelia Sari, Pelaksanaan Peralihan Hak Milik Atas Tanah (Karena Jual Beli dalam Mewujudkan Kepastian Hukum) di Kabupaten Kutai Barat Kalimantan Timur, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta: 2016, hlm 23.

²Bambang Semedi, *Penegakan Hukum Yang Menjamin Kepastian Hukum*, Artikel, Pusdiklat Bea Dan Cukai, Desember 2013, hlm. 2.

³Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

⁴*Ibid.*

⁵Adijani Al-Alaby, *Opcit*, hlm.5.

⁶<http://www.jurnalhukum.com/tanah-wakaf/diakses>, tanggal, 08 Desember 2016 pukul 10.39

(dua) orang saksi.⁷ Berkaitan dengan Tata cara perwakafan tanah milik Pihak yang hendak mewakafkan tanahnya diharuskan datang dihadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf untuk melaksanakan Ikrar Wakaf.

Berdasarkan uraian diatas, ternyata mengenai tata cara pewakafan tanah milik masih terjadi pengabaian aturan di dalam masyarakat terkhusus di Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau dimana perwakaf atau (*Wakif*) saat melakukan perwakafan tanah milik tidak melakukan prosedur atau tata cara yang di atur dalam Peraturan Perundang-undangan, Berikut ini data yang bersumber dari Kementerian Agama (KEMENAG) dan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau sebagai berikut :

Tabel I.I.
Jumlah Tanah Wakaf Yang Dilaksanakan Melalui Ikrar Wakaf Di Hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) Tahun 2011 S/D Agustus 2016

No	Tahun	Jumlah Wakaf di Kementerian Agama Untuk Wilayah Kec. Mandah	Jumlah Tanah Wakaf di KUA Kec.Mandah	Ket.
1	2011	3	3	-
2	2012	14	14	-
3	2013	6	6	-
4	2014	-	11	Belum terdata di Kemenag
5	2015	-	3	Belum terdata di Kemenag
6	2016	-	2	Belum terdata di Kemenag
	TOTAL WAKAF	23	39	

Sumber: Data olahan dari Kementerian Agama (KEMENAG) dan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau

Berdasarkan tabel Kementerian Agama dan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau jumlah tanah wakaf milik yang Dilaksanakan Melalui Ikrar Wakaf Di Hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) memiliki jumlah yang fluktuatif menurun. Timbul pertanyaan penulis apakah karna faktor kesadaran masyarakat atau masyarakat yang tidak tahu hukum. Dari tabel tersebut di atas tahun 2014-2016 mengenai Ikrar Wakaf di Hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) pun tidak terdata di Kementerian. Sehingga mengenai ikrar wakaf ini menjadi permasalahan pokok pada saat sekarang.

⁷Pasal 17, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

Data di atas di konfrontir dengan data yang di peroleh penulis dari lapangan sehingga mengenai permasalahan terkait wakaf tanah milik di Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir masih banyak pewakafan tanah hak milik yang tidak melakukan Ikrar Wakaf di Hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW).⁸ Masyarakat Kecamatan Mandah masih menggunakan kebiasaan-kebiasaan keagamaan seperti kebiasaan melakukan perbuatan hukum perwakafan tanah secara lisan maupun dengan surat keterangan yang di buat antara wakif dan nadzir dengan atas dasar saling percaya, karna kebiasaan masyarakat memandang wakaf sebagai amal soleh yang mempunyai nilai ibadah dalam kepercayaan Agama Islam yang merupakan hubungan Manusia dengan Maha Pencipta.

Kebiasaan masyarakat dalam perwakafan yang di lakukan dengan lisan dan dengan surat keterangan yang dibuat antara wakif dan nadzir ini tidak dilakukan sesuai perintah perundang-undangan tentang wakaf yang mengharuskan Pihak yang mewakafkan tanahnya harus mengikrarkan kehendaknya secara jelas dan tegas kepada Nadzir dihadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf sehingga bagaimana status hak wakaf yang di lakukan di luar ketentuan Perundang-undangan tersebutpun di pertanyakan.

Berdasarkan penelitian penulis dilapangan, Salah satu wakif yang di temui oleh penulis di kecamatan mandah yang mewakafkan tanah miliknya dilakukan tanpa melalui ikrar wakaf di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW).⁹ Bahkan

menurut pengakuan beliau di atas tanah yang telah di wakafkannya tersebut pernah salah seorang adiknya mengambil hasil dari tanah wakaf tersebut. Sehingga yang menjadi pertanyaan penulis yaitu bagaimana status hak wakaf yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, terlebih jika terjadi permasalahan seperti ini dan bagaimana hukum keperdataan menjamin hak-hak dari Nadzir yang telah menerima harta benda wakaf dari Wakif tersebut untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya. Sebagaimana yang di ketahui bahwa telah terjadi peralihan hak dari Wakif kepada Nadzir. Dari uraian latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang masalah ini dengan judul: **“STATUS HAK WAKAF YANG TIDAK SESUAI DENGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF DI KECAMATAN MANDAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR”.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang timbul adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peralihan hak tanah wakaf di Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir ?
2. Bagaimana status hak wakaf yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf di Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir ?
3. Apa saja solusi yang dapat dilakukan dalam mengatasi permasalahan mengenai status hak wakaf yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun

⁸Berdasarkan Wawancara dengan Ibu Dayang Lani, Bagian Tata Usaha di Kantor Urusan Agama, yang menangani Masalah Wakaf di Kecamatan Mandah Kabupaten Inderagiri Hilir Provinsi Riau, pada hari Jumat 02 Desember 2016 jam 10:00.

⁹Berdasarkan Wawancara dengan Bapak H.Said Abu Bakar, Pemberi Wakaf (*wakif*) Yang Tidak

Mendaftarkan di Kecamatan Mandah Kabupaten Inderagiri Hilir Provinsi Riau, pada hari Jumat 02 Desember 2017 jam 01:00.

2004 Tentang Wakaf di Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir ?

C. Tinjauan Pustaka

1. Istilah dan Definisi Wakaf

Wakaf berasal dari bahasa “*al-habsu*”, sedangkan secara harafiah wakaf berarti menahan dan mengekang atau menghentikan, sedangkan menurut Istilah wakaf adalah menghentikan perpindahan hak milik atas harta yang bermanfaat dan tahan lama dengan cara menyerahkan kepada pengelola, baik perseorangan, keluarga, maupun lembaga untuk digunakan bagi kepentingan umum di jalan Allah SWT.¹⁰

2. Perwakafan Dalam Perspektif Islam

Wakaf adalah salah satu lembaga Islam yang potensial untuk dikembangkan, khususnya dinegara-negara berkembang. Pengelolaan wakaf secara produktif itu sebenarnya sudah dilakukan sejak awal Islam sehingga pada waktu itu wakaf dimanfaatkan untuk memberdayakan ekonomi umat.¹¹

3. Perkembangan Wakaf di Indonesia

Pada masa pra kemerdekaan Republik Indonesia lembaga perwakafan sering dilakukan oleh masyarakat yang beragama Islam. Hal ini sebagai konsekuensi logis dari banyaknya kerajaan islam di di indonesia, seperti kerajaan Demak, kerajaan Pasai dan

sebagainya. Sekalipun pelaksanaan wakaf bersumber dari ajaran Islam, namun wakaf seolah-olah merupakan kesepakatan ahli hukum dan budaya bahwa perwakafan adalah masalah dalam budaya hukum yang sudah mengakar bagi umat Islam Indonesia. Sebab diterimanya lembaga wakaf ini berasal dari suatu kebiasaan dalam pergaulan kehidupan masyarakat Indonesia. Maka tidak jarang orang Indonesia membangun masjid, pesantren dan sekolah untuk bersama-sama secara bergoto-toyong.¹²

D. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

A. Pelaksanaan Peralihan Hak Atas Tanah Wakaf Di Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir.

1. Pengakuan Mengenai Hak-hak Atas Tanah Wakaf Untuk Keperluan Suci Dan Sosial Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Konsideran UUPA tentang menimbang huruf (c) juga di tegaskan bahwa hukum agraria nasional itu harus mewujudkan penjelmaan daripada Ketuhanan Yang Maha Esa, Perikemanusiaan, Kebangsaan, Kerakyatan dan Keadilan Sosial, sebagai azas kerohanian Negara dan cita-cita bangsa seperti yang tercantum di dalam Pembukaan Undang-undang Dasar. Di Dalam konsideran UUPA tercantum

¹⁰ Devi Megawati, 2014, Pengelolaan Dan Pengembangan Wakaf Produktif Di Kota Pekanbaru, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru.

¹¹ Tuti A. Najib dan Ridwan al-Makssary, 2006, *Wakaf, Tuhan, dan Agenda Kemanusiaan Studi tentang Wakaf dalam Persepektif Keadilan Sosial di Indonesia*, Uin Syarif Hidayatullah, Jakarta.

¹² Afif Noor, Perwakafan Tanah Dan Pendaftarannya Pasca Berlakunya UU.NO. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Di Kota Semarang, *Jurnal ilmu Hukum*, Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Diponegoro Semarang, Semarang: 2011, hlm. 263-270. Muhammad Tahir Azhary, *Beberapa Aspek Hukum Tata Negara, Hukum Pidana, Dan Hukum Islam*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2012, hlm. 179.

dengan tegas bahwa reformasi agraria terutama menyangkut tanah harus merupakan penjelmaan dari Pancasila sebagai asas kerohanian Negara dan cita-cita bangsa. Hal ini juga dicantumkan dengan tegas di dalam Pembukaan UUD 1945.¹³

Di dalam pembukaan UUD 1945, Dalam alinea ketiga ditegaskan bahwa proklamasi sebagai tonggak pembobolan hukum lama dan penggantian hukum yang baru untuk Indonesia bersatu dan ini adalah kehendak dari Tuhan Yang Maha Esa. Hal ini ditegaskan bahwa atas rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan di dorong oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan kemerdekaannya. Dengan demikian dapat dilihat bahwa kehidupan dalam kemerdekaan di Indonesia dilandasi dengan keagamaan. Di dalam alinea ke empat disebut bahwa kemerdekaan Indonesia itu disusun dalam suatu Undang-Undang Dasar, yang didasarkan kepada lima dasar yang disebut dengan pancasila, dengan susunan utama dan pertama adalah Ketuhanan Yang Maha Esa. Pada hakikatnya seluruh bangsa Indonesia adalah manusia beragama, dan tidak ada tempat bagi manusia yang tidak beragama di Indonesia.¹⁴

2. Pelaksanaan Peralihan Hak Atas Tanah Wakaf Berdasarkan Amanat Peraturan Perundang-Undangan dan Pelaksanaan Peralihan Hak Atas Tanah Wakaf di Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir.

a. Pengaturan Peralihan Hak Atas Tanah Wakaf Berdasarkan dalam Peraturan Perundang-Undangan

Perwakafan tanah milik dilindungi dan diatur dengan Peraturan Pemerintah. Penegasan tentang perwakafan hanya terhadap tanah milik ditegaskan lebih lanjut di dalam Peraturan Pemerintah (PP). Dan PP tersebut kemudian lahir di tahun 1977 dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Pewakafan Tanah Milik.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf menyatakan bahwa Pihak yang mewakafkan tanahnya harus mengikrarkan kehendaknya secara jelas dan tegas kepada Nadzir dihadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf yang kemudian menuangkannya dalam bentuk Akta Ikrar Wakaf. Dengan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi.¹⁵ Berkaitan dengan Tata cara perwakafan tanah milik Pihak yang hendak mewakafkan tanahnya diharuskan datang dihadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf untuk melaksanakan Ikrar Wakaf.

¹³Yulia Mirwati, *Wakaf Tanah Ulayat Dalam Dinamika Hukum Indonesia*, Rajawali Grafindo pPersada, Jakarta: 2016, hlm. 78.

¹⁴*Ibid*,

¹⁵Pasal 17, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

b. Prinsip Kebiasaan dalam Masyarakat Terhadap Perbuatan Hukum Perwakafan di Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir

Pelaksanaan peralihan hak atas tanah wakaf di Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir, berdasarkan data yang di peroleh penulis yaitu ternyata mengenai tata cara pewakafan tanah milik masih terjadi pengabaian ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, di dalam masyarakat terkhusus di Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau dimana pewakaf atau (*Wakif*) saat melakukan perwakafan tanah milik tidak melakukan prosedur atau tata cara yang di atur dalam Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf, dari tahun 2014-2016 data yang masuk di Kementrian Agama Khusus untuk Kecamatan Mandah dan Kantor Urusan Agama di Kecamatan Mandah, mengenai Ikrar Wakaf di Hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) pun tidak terdata di Kementrian. Adapun harta benda yang ingin diwakafkan maka terlebih dahulu untuk dihadapkan kepada Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) dengan menghadirkan saksi yaitu paling sedikit dua orang saksi, terlepas dari hal diatas tersebut, sebagaimana terdapat Pasal 32 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf yang menyatakan bahwa PPAIW atas nama nadzir mendaftarkan

harta benda wakaf kepada Instansi yang berwenang paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak akta Ikrar Wakaf ditandatangani.

Kebiasaan masyarakat dalam pewakafan yang di lakukan dengan lisan dan dengan surat keterangan yang dibuat antara wakif dan nadzir ini tidak sesuai Peraturan Perundang-undangan tentang wakaf, sebagaimana terdapat di pasal 17 ayat (1) yang mengharuskan Pihak yang mewakafkan tanahnya harus mengikrarkan kehendaknya secara jelas dan tegas kepada Nadzir dihadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf.

Berdasarkan data yang diperoleh dari sampel yang penulis wawancara, Salah satunya yang penulis temukan dimasyarakat Kecamatan Mandah ada seseorang warga mewakafkan tanah guna untuk kepentingan Pendidikan di SDN Nomor 45 Mandah, yang mana ketika itu sebagai wakif adalah bapak said Abu Bakar dan sebagai penerima kepala SDN Nomor 45 Mandah adalah ibu syarifah hadiah, ketika melakukan pewakafan tanah tersebut tidak berlangsung di Kantor Urusan Agama (KUA) tidak melalui ikrar di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf terlebih dahulu akan tetapi mereka menuangkan isi dari Ikrar tersebut didalam selembar kertas yang merupakan bukti tertulis dari wakif kepada nadzir dan di saksikan oleh pemilik tanah

diperbatasan tanah yang diwakafkan.¹⁶

c. Permasalahan Yang Terjadi di Masyarakat Mandah Terhadap Peralihan Hak Atas Tanah Wakaf Yang di Lakukan Dengan Pinsip Kebiasaan

Pola kebiasaan masyarakat Kecamatan Mandah memiliki konsep kepercayaan masih menggunakan kebiasaan dalam melakukan perbuatan-perbuatan hukum, penulis menemukan perbuatan serupa yang dilakukan oleh sebagian besar masyarakat disana dimana sudah menjadi kebiasaan masyarakat ketika mereka mewakafkan tanah milik nya tidak di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf. Namun Peralihan hak atas tanah wakaf SD Nomor 45 ini pun menimbulkan permasalahan hukum dimana adik dari bapak said Abu bakar sebagai pemberi wakaf tersebut sering mengambil hasil dari tanah yang diwakafkannya, padahal beliau mengetahui bahwa tanah tersebut telah diwakafkan. Menurut Bapak Syaifudin, ketika mewakafkan tanah oleh wakif kepada nadzir maka pada saat itu juga telah terjadi peralihan hak atau pelepasan hak oleh wakif kepada nadzir yang mana intinya bahwa wakif tidak ada hak lagi atas tanah tersebut.¹⁷

¹⁶Berdasarkan Wawancara dengan Bapak H. Said Abu Bakar, Pemberi Wakaf (*Wakif*) Yang Tidak Mendaftarkan di Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, pada hari jumat 02 Desember 2016 jam 01:00.

¹⁷Berdasarkan Wawancara dengan Bapak Syaifudin, Staf Pengurusan Bagian Perwakafan, di Kabupaten Tembilahan Provinsi Riau, pada hari Senin 01 Desember 2016 jam 09:40.

Hal tersebut pun di jelaskan oleh Ibu syarifah hadiyah, pada saat perwakafan tersebut beliau pada saat itu menjabat sebagai Kepala SDN. 045 Kecamatan Mandah dan sebagai penerima wakaf beliau membenarkan hal-hal diatas yang mana ketika status wakaf pada saat itu telah menjadi sah menjadi milik sekolah ketika telah terjadi peralihan hak atau perlepasan hak yang dilakukan antara pemberi dan penerima yang sah yang mana artinya tidak ada kepaasaan antara si pemberi ketika mewakafkan tanah nya.¹⁸

B. Status Hak Wakaf Yang Tidak Sesuai Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

1. Perwakafan Dapat Dilakukan Melalui Ikrar Wakaf Di Hadapan PPAIW Maupun Di Lakukan Antara Kedua Belah Pihak Dengan Lisan Maupun Tulisan Secara Dibawah Tangan.

Indonesia merupakan negara hukum seperti disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Tujuan negara hukum adalah untuk menyelenggarakan dan menjaga ketertiban hukum agar semua aspek kehidupan bernegara berjalan menurut hukum. Negara hukum menjamin adanya tertib hukum dalam masyarakat. Tujuan negara Indonesia sebagai negara hukum juga menciptakan masyarakat adil dan makmur baik material maupun spiritual. Konsep *rechtsstaat* bagi Indonesia dapat dikategorikan Sebagai negara

¹⁸Berdasarkan Wawancara dengan Ibu syarifah hadiyah, Penerima Wakaf (Nadzir) di Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, pada hari Senin 09 Januari jam 10:23.

kesejahteraan (*verzorgingsstaat*), negara yang makmur secara material dan spiritual.¹⁹

Dalam KUH Perdata Indonesia, pengaturan hak milik dapat di jumpai dalam Titel Ketiga Pasal 570 sampai dengan Pasal 624 Buku II KUH Perdata Indonesia. Pasal-Pasal tersebut mengatur mengenai pengertian dan pembatasan penggunaan hak milik serta bagaimana cara memperoleh atau terjadinya peralihan hak milik atau hapusnya hak milik. Perlu diingat setelah berlakunya UUPA, pengertian hak milik disini terbatas hanya pada pengertian hak milik atas kebendaan bukan tanah, sebab pengertian hak milik atas tanah telah diatur dalam UUPA.²⁰

Berdasarkan apa yang ditulis dalam bukunya Mariam Darus Badruzaman, bahwa sumber perjanjian adalah seperti apa yang tertera dalam pasal 1233 KUH Perdata, yaitu : “Tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, baik karena undang-undang.”²¹ perwakafan merupakan suatu perikatan yang dapat dilakukan melalui ikrar wakaf di hadapan PPAIW maupun di lakukan antara kedua belah pihak dengan lisan maupun tulisan secara dibawah tangan. Berdasarkan Pasal 1847 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, akta dibawah tangan adalah akta yang dibuat oleh para pihak yang dilakukan tidak di hadapan pejabat

umum. Pejabat umum dalam perbuatan hukum wakaf adalah PPAIW/Kepala KUA.

Peralihan Hak Milik Tanah Wakaf dari Wakif ke Nadzir sebagai yang mengurus harta wakaf tersebut untuk di peruntukan bagi kepentingan sosial dan keagamaan, Harta benda yang telah diwakafkan oleh pemiliknya menjadi milik umat atau aset publik. Sebagai aset publik wakaf harus dilindungi secara hukum agar terhindar dari penyelewengan seperti beralih menjadi aset pribadi. Berbagai peraturan perundangan telah dibuat oleh Pemerintah Indonesia untuk memberikan perlindungan hukum terhadap wakaf.

2. Akibat hukum dari pelaksanaan wakaf yang tidak sesuai dengan Peraturan Perundangan di Kecamatan Mandah Kabupaten Inderagiri Hilir.

Harta benda wakaf merupakan aset publik yang harus dilindungi secara hukum. Wakaf merupakan perbuatan hukum yang pelaksanaannya harus sesuai dengan prosedur perundang-undangan. Perbuatan hukum wakaf wajib dituangkan dalam akta ikrar wakaf. Namun dalam praktek masih terdapat pelaksanaan wakaf yang dilakukan tidak sesuai prosedur hukum. Pelaksanaan wakaf tidak dituangkan dalam Akta Ikrar Wakaf seperti yang terjadi di Kecamatan Mandah Kabupaten Inderagiri Hilir yang dimana masyarakat nya melakukan perbuatan hukum melalui akta di bawah tangan sehingga tidak memiliki kekuatan hukum.

Menurut hukum Islam, wakaf memang telah terjadi seketika dengan adanya pernyataan *wakif*

¹⁹ Sayuti, 2011, “Konsep Rechtsstaat dalam Negara Hukum Indonesia; Kajian terhadap Pendapat Azhari”, dalam *Jurnal Nalar Fiqh*. Vol. 4, Nomor 2.

²⁰ Rachmadi Usman, *Hukum Perwakafan Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta: 2009, hlm. 35.

²¹ Mariam Darus Badruzaman, *K.U.H. Perdata Buku III Hukum Perikatan Dengan Penjelasan*, Alumni, Bandung: 1991, hlm. 1.

(orang yang wakaf) yang merupakan *ijab*, karena pelaksanaan wakaf dipandang sebagai perbuatan hukum sepihak.²² Namun untuk menjamin kepastian hukum, mengharuskan wakaf dilakukan secara lisan dan tertulis di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW), dibuatkan Akta Ikrar Wakaf (AIW), didaftarkan, disertifikasi, dan diumumkan ke publik. Apabila benda wakaf berupa tanah milik dengan berdasarkan Akta Ikrar Wakaf tanah tersebut didaftarkan dan diajukan perubahan sertifikat ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk diubah menjadi tanah wakaf atas nama *Nadzir* (pengelola wakaf). Hal ini di atur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf.

Ikrar wakaf seharusnya dituangkan dalam Akta Ikrar Wakaf untuk mencegah terjadinya sengketa yang disebabkan tidak jelasnya status dan kedudukan wakaf, baik antara wakif ataupun ahli warisnya dengan nadzir ataupun antara keluarga wakif dengan masyarakat umum. Akta Ikrar Wakaf menjadi bukti otentik wakaf apabila terjadinya sengketa dalam kasus di mana setelah wakif meninggal dunia, ahli warisnya tidak mengakui dan meminta kembali wakaf yang telah dilakukan. Selain itu, Akta Ikrar Wakaf juga untuk melindungi tanah wakaf tersebut. Namun

dalam praktek masih terdapat pelaksanaan wakaf yang dilakukan tidak memenuhi ketentuan perundang-undangan seperti yang terdapat di Kecamatan Mandah Kabupaten Inderagiri Hilir Benda wakaf yang ada di Kecamatan Mandah umumnya berupa tanah mayoritas belum memiliki Akta Ikatan Wakaf (AIW) dan sertifikat sebagai tanah wakaf.

Akta ikrar wakaf sebagai bukti otentik perbuatan hukum wakaf dapat di temui dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Dalam Pasal 1 ayat (6) menyebutkan bahwa Akta Ikrar Wakaf (AIW) yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) adalah bukti pernyataan kehendak *wakif* untuk mewakafkan harta benda miliknya guna dikelola *nadzir* sesuai dengan peruntukan yang dituangkan dalam bentuk akta.

Akibat hukum dari pelaksanaan wakaf yang sesuai dengan hukum adalah;²³

- 1) Kepastian hukum atas harta yang diwakafkan;
- 2) Dapat membuat rasa aman bagi orang yang wakaf bahwa proses pelaksanaan wakaf telah sesuai dengan aturan syari'ah dan perundang-undangan;
- 3) Kepastian kekekalan manfaat benda wakaf sesuai dengan tujuan dan sasaran wakaf dapat terjaga;

²²Hamzani, Achmad Irwan. *Perkembangan Hukum Wakaf di Indonesia*, Diya Media Group, Brebes: 2015, hlm, 72.

²³Hermit, Herman, *Cara Memperoleh Sertifikat Tanah Wakaf*. Mandar Maju, Bandung: 2007, hlm. 5.

- 4) Sebagai antisipasi apabila terjadi sengketa wakaf di kemudian hari.

Mengenai Status hak wakaf yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf penulis menyimpulkan bahwa Semua peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perwakafan tanah menegaskan perlunya sertifikasi, untuk mendapatkan sertifikat tanah wakaf di atur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006.

Meskipun dalam kajian hukum Islam tidak terdapat dasar hukum yang mewajibkan agar tanah wakaf memiliki sertifikat wakaf. Namun terdapat anjuran untuk melakukan pencatatan sebagai bentuk upaya perlindungan hukum dan meminimalisir sengketa terhadap status benda wakaf. Sehingga status tanah wakaf yang tidak dilakukan melalui akta ikrar wakaf di hadapan PPAIW memiliki kekuatan pembuktian yang tidak sempurna bahkan meskipun secara pandangan islam perbuatan itu sah namun dalam pandangan peraturan perundang-undangan perwakafan menjadikan tidak diakuinya perbuatan hukum perwakafan tersebut.

Uraian penulis ini juga di simpulkan dari wawancara narasumber yang menyatakan bahwa Mengenai Akta di bawah tangan terhadap perbuatan hukum perwakafan tersebut sah secara agama islam dilakukan akan tetapi tidak diakui oleh Negara menurut peraturan perundang-undangan wakaf dan akta di bawah tangan

tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna.²⁴ Jadi dapat dikatakan status hak wakafnya secara Undang-undang wakaf tidak diakui, namun hak wakaf yang secara di bawah tangan dapat dijadikan alat bukti persidangan namun tidak memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna.

C. Solusi Yang Dapat Dilakukan Dalam Mengatasi Permasalahan Mengenai Status Hak Wakaf Yang Tidak Sesuai Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf di Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir.

Pejabat umum dalam pembuatan hukum wakaf adalah PPAIW/Kepala KUA. Pelaksanaan wakaf di bawah tangan dapat menimbulkan masalah di kemudian hari yang berkaitan dengan status kepemilikan tanah wakaf tersebut seperti diambil alih oleh ahli waris wakif, maupun berpindah kepemilikan menjadi milik pribadi nadzir, ahli waris nadzir maupun pihak lain. Apabila terjadi sengketa, misalnya ahli waris wakif menyangkal bahwa pewarisnya telah mewakafkan tanah kepada nadzir, maka nadzir tidak dapat mempertahankan tanah wakaf tersebut.

Praktik wakaf yang dilaksanakan di Indonesia masih dilaksanakan secara konvensional yang memungkinkan rentan terhadap berbagai masalah dan tidak sedikit yang berakhir di Pengadilan. Kondisi ini diperparah lagi dengan adanya penyimpangan terhadap benda-benda wakaf yang dilakukan oleh oknum

²⁴Berdasarkan Wawancara dengan Bapak Fachrudi Rasyid, Kepala Kantor Urusan Agama (PPAIW) di Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, pada hari Senin 02 Januari 2017 jam 09:00.

yang tidak bertanggungjawab, dan juga sudah menjadi rahasia umum ada benda wakaf yang diperjualbelikan. Keadaan ini tidak hanya berdampak buruk kepada perkembangan wakaf di Indonesia, tetapi merusak nilai-nilai luhur ajaran agama islam yang semestinya harus dijaga kelestariannya sebab ia merupakan bagian dari ibadah kepada Allah SWT.²⁵

1. Hambatan Yang di hadapi Kementrian Agama dalam Menjalankan Amanat Peraturan Perundang-Undangan Tentang Perwakafan di Kecamatan Mandah Kabupaten Inderagiri Hilir.

Adapun menurut Bapak Syaifudin Faktor-Faktor yang mempengaruhi masyarakat melakukan perbuatan hukum perwakafan tanpa melalui ikrar wakaf di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf sebagai berikut :²⁶

a. Kurangnya anggaran untuk sosialisasi mengenai regulasi tentang hukum perwakafan

Sosialisasi kepada masyarakat khususnya nadzir atau pengelola tanah wakaf terhadap pentingnya pengaturan yang dibuat didalam Undang-Undang yang menyangkut tentang wakaf seperti Peraturan Pemerintah No.28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, dan khusus nya Undang-Undang Republik Indonesia No.41

Tahun 2004 tentang Wakaf. Mengakibatkan masyarakat merasa cukup dengan Perwakafan yang dilakukan secara lisan atau dengan bukti tertulis dibawah tangan.

b. Kurangnya Kesadaran hukum pihak-pihak yang terlibat dalam proses perwakafan

Pengelola tanah wakaf dan pemberi wakaf belum mempunyai kesadaran hukum terhadap pentingnya status hak wakaf yang sah dan dapat diterima dan diakui oleh negara. Padahal melalui prosedur dan tata cara yang benar sesuai di dalam Undang-Undang tentang Wakaf secara yuridis status tanah wakaf akan lebih kuat karena memberikan kepastian dan perlindungan hukum terhadap keberadaan tanah-tanah wakaf tersebut.

2. Solusi Yang Dapat Dilakukan Dalam Mengatasi Permasalahan Peralihan Hak Atas Tanah Wakaf yang Sesuai Dengan Undang-Undang Wakaf di Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir.

Menurut penulis, solusi yang dapat dilakukan dalam mengatasi permasalahan mengenai Peralihan hak wakaf yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf di Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir yaitu jika dilihat dari perkembangan pola kehidupan perbuatan hukum masyarakat setempat yang masih memakai prinsip kebiasaan melakukan dengan dasar saling percaya sehingga melakukan perbuatan

²⁵Suhrawardi K Lubis, *Wakaf dan Pemberdayaan Umat*, Sinar Grafika, Jakarta: 2010, hlm. 144.

²⁶Berdasarkan Wawancara dengan Bapak Syaifudin, Staf Pengurusan Bagian Perwakafan, di Kementrian Agama di Kabupaten Inderagiri Hilir Provinsi Riau, pada hari Senin 09 Januari 2017 jam 09:00.

perwakafan tanpa melalui akta ikrar wakaf di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf.

Maka solusi yang dapat dilakukan yaitu untuk menjadikan seluruh harta benda wakaf di Kecamatan Mandah di atur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan, adanya peran aktif pemerintah yang mana di wakili oleh Kantor Urusan Agama untuk menjadi inisiator dan memberikan perhatian lebih dalam pengurusan harta wakaf tersebut tanpa menunggu dari wakif dan nadzir yang pergi menghadap ke Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf. Sehingga untuk mempermudah pembuatan Akta Ikrar Wakaf tersebut kedepannya perlu penyuluhan hukum kepada setiap warga masyarakat bahwa pentingnya melakukan perwakafan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan Agar dapat melindungi Aset publik.

E. KESIMPULAN

1. Pelaksanaan peralihan hak atas tanah wakaf di Kecamatan Mandah Kabupaten Inderagiri Hilir yaitu masih terdapat Kebiasaan masyarakat dalam perwakafan yang di lakukan dengan lisan dan surat keterangan yang dibuat antara wakif dan nadzir sehingga tidak dilakukan sesuai perintah perundang-undangan tentang wakaf yang mengharuskan Pihak yang mewakafkan tanahnya harus mengikrarkan kehendaknya secara jelas dan tegas kepada Nadzir dihadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf.
2. Satatus hak wakaf yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, sebagai contoh kasus dimana diKecamatan Mandah ini melakukan Pewakafan tanah yang tidak sesuai dengan

Peraturan Perundang-undangan, juga melakukan kesalahan yang dianggap telah menyalah aturan mengenai pelaksanaan Perwakafan di Indonesia Sehingga status tanah wakaf yang tidak dilakukan melalui akta ikrar wakaf di hadapan PPAIW memiliki kekuatan pembuktian yang tidak sempurna. Bahkan daripada itu meskipun secara pandangan islam perbuatan itu sah namun dalam pandangan peraturan perundang-undangan perwakafan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan praktik Perundang-undangan mengakibatkan tidak diakuinya perbuatan hukum perwakafan tersebut.

3. Solusi yang dapat dilakukan dalam mengatasi permasalahan mengenai status hak wakaf yang tidak sesuai dengan Undang-Undang yaitu Agar pemberian wakaf yang dilakukan secara lisan atau di bawah tangan di Kecamatan Mandah tetap diakui secara hukum, maka bentuk solusi lain yang dapat dilakukan adalah Apabila wakif masih hidup maka solusinya yaitu dengan dibuatkan Akta Ikrar Wakaf oleh PPAIW, serta yang berhubungan dengan wakaf agar di daftarkan kepada Instansi yang berwenang seperti Kantor Urusan Agama dan Kantor Kementrian Agama, Mengenai wakif yang telah meninggal dunia solusi yang dapat dilakukan yaitu dengan dibuatkan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf (APAIW) dan Tidak menutup kemungkinan dalam pembuatan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf (APAIW) ahli waris wakif mengingkari adanya pemberian wakaf oleh wakif.

F. Saran

1. Sebaiknya adanya peran aktif pemerintah yang mana di wakili oleh Kantor Urusan Agama untuk menjadi inisiator yang memberikan perhatian lebih dalam pengurusan

harta wakaf tersebut tanpa menunggu dari wakif dan nadzir yang pergi menghadap ke Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf. Diharapkan Pemerintah dapat mengatasi permasalahan mengenai status hak wakaf yang telah dilakukan tidak sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf terkhusus di Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir.

2. Sehingga untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat tersebut kedepannya perlu penyuluhan hukum kepada setiap warga masyarakat terkhusus masyarakat kecamatan mandah mengenai pentingnya melakukan perwakafan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan Agar dapat melindungi Aset umat dan publik.
3. Kepada masyarakat khususnya dikecamatan mandah agar lebih memperhatikan pentingnya pengikraran wakaf di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf dan meningkatkan kesadaran hukum masing-masing individu agar kedepannya dapat meminimalisir persengketaan terhadap tanah wakaf. Sehingga perlunya sinergi antara masyarakat dengan pemerintah dalam hal ini di wakili oleh Kantor Urusan Agama (KUA).

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Al-Alaby, Adijani, 2002, *Perwakafan Tanah Di Indonesia Dalam Teori Dan Praktek*, Rajawali Press, Jakarta.
- Bambang semedi, 2013, *Penegakan Hukum Yang Menjamin Kepastian Hukum*, Artikel,Pusdiklat Bea Dan Cukai.
- Hamzani, Achmad Irwan. 2015, *Perkembangan Hukum Wakaf di Indonesia*, Diya Media Group, Brebes.

Hermit, Herman, 2007, *Cara Memperoleh Sertifikat Tanah Wakaf*. Mandar Maju, Bandung.

Mariam Darus Badruzaman, 1991, *K.U.H. Perdata Buku III Hukum Perikatan Dengan Penjelasan*, Alumni, Bandung.

Rachmadi Usman, 2009, *Hukum Perwakafan Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

Suhrawardi K Lubis, 2010, *Wakaf dan Pemberdayaan Umat*, Sinar Grafika, Jakarta.

Tuti A. Najib dan Ridwan al-Makssary, 2006, *Wakaf, Tuhan, dan Agenda Kemanusiaan Studi tentang Wakaf dalam Persepektif Keadilan Sosial di Indonesia*, Uin Syarif Hidayatullah, Jakarta.

Yulia Mirwati, 2016, *Wakaf Tanah Ulayat Dalam Dinamika Hukum Indonesia*, Rajawali Grafindo Persada, Jakarta.

B. Jurnal/Skripsi/Kamus/Makalah

Aprelia Sari,Agnes, 2016, Pelaksanaan Peralihan Hak Milik Atas Tanah (Karena Jual Beli dalam Mewujudkan Kepastian Hukum) di Kabupaten Kutai Barat Kalimantan Timur, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta.

Afif Noor, 2011, Perwakafan Tanah Dan Pendaftarannya Pasca Berlakunya UU.NO. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Di Kota Semarang, *Jurnal ilmu Hukum*, Fakultas Ilmu Hukum,Universitas Diponegoro Semarang, Semarang.

Devi Megawati, 2014, Pengelolaan Dan Pengembangan Wakaf Produktif Di Kota Pekanbaru, *Jurnal Hukum Islam*, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru.

Sayuti, 2011, "Konsep Rechtsstaat dalam Negara Hukum Indonesia; Kajian terhadap Pendapat Azhari",

dalam *Jurnal Nalar Fiqh*. Vol. 4, Nomor 2.

dan diterjemahkan oleh Google Translate.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 159 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4459.

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 38 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3107.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59 tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3696.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1977 Tentang Tata Pendaftaran Tanah Mengenai Perwakafan Tanah Milik.

D. Website

<http://www.jurnalhukum.com/tanah-wakaf/> diakses, tanggal, 08 Desember 2016.

Jurnal West Law, diakses melalui <http://fh.unri.ac.id/index.php/perpus-takaan/#>, pada tanggal 09 Juli 2017 dan diterjemahkan oleh Google Translate.

Jurnal West Law, diakses melalui <http://fh.unri.ac.id/index.php/perpus-takaan/#>, pada tanggal 09 Juli 2017